

# **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan**

**Istifara Suci Pangestuning Ajeng<sup>1</sup>**

*Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Indonesia.*

*Email: IstifaraSPA@gmail.com*

**Wadhan<sup>2\*</sup>**

*Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Indonesia.*

*Email:wadhan.febi@gmail.com*

**\*Corresponding Author**

## **Abstract:**

This research aims to determine the influence of the regional financial accounting system and internal control system on the quality of the regional government's financial reports in Pamekasan Regency. This research uses quantitative methods with causal associative research. This research was conducted on 35 SKPDs in Pamekasan Regency. The population and sample are the Head of SKPD and Head of SKPD Finance with 2 respondents in each agency. The results of the research show that the regional financial accounting system variable obtained a value of  $t_{count} > t_{table}$ , namely  $4.914 > 1.670$  with a significance value of  $0.000 < 0.05$ , which means that the regional financial accounting system partially has a positive and significant effect. The internal control system variable obtained a value of  $t_{count} > t_{table}$ , namely  $6.019 > 1.670$  with a significance value of  $0.000 < 0.05$ , which means that the internal control system partially has a positive and significant effect. Based on research on the F test, the  $F_{count} > F_{table}$  value is  $114.849 > 3.15$  and the significant value is  $0.000 < 0.05$ .

**Keywords:** *Regional Financial Accounting System.*

## **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Penelitian ini dilakukan pada 35 SKPD yang berada di Kabupaten Pamekasan. Populasi dan sampel yaitu Kepala SKPD dan Kepala Bagian Keuangan SKPD dengan responden sebanyak 2 orang pada tiap instansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu sebesar  $4,914 > 1,670$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang artinya sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Pada variabel sistem pengendalian internal memperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu sebesar  $6,019 > 1,670$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang artinya sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan penelitian pada uji F memperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu sebesar  $114,849 > 3,15$  dan nilai signifikan yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

## PENDAHULUAN

Tata Kelola pemerintah yang baik merupakan cerminan sebuah keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan yang direncanakan<sup>1</sup>. Agar efektif dan efisien dalam menyelenggarakan tata Kelola yang baik maka pemerintah pusat mendelegasikan kepada pemerintah daerah yaitu dengan desentralisasi atau otonomi daerah<sup>2</sup>. *Good governance* merupakan suatu konsep dimana proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama sebagai hasil dari suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.<sup>3</sup>

Pemerintah adalah entitas pelapor yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan, penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat, dan terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut.<sup>4</sup> Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan untuk mengetahui proses pengelolaan dan penilaian kinerja yang menjadi wujud pertanggungjawaban bahan untuk pengambilan keputusan pada bidang keuangan<sup>5</sup>.

Pemerintah yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada, salah satunya yang terpenting adalah keuangan.

Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan, serta d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Nadia Dwi Irmadiani, "2792-7524-1-Pb," *Pulic Service and Governance Journal* 03, no. 01 (2022): 67–79, file:///C:/Users/WADHAN/Downloads/SIA/2792-7524-1-PB.pdf.

<sup>2</sup> Frederic Winston Nalle, Kamilaus K Oki, and Putra M M Sangaji, "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Inovasi* 17, no. 1 (2021): 184–97, [https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf](https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle%20et%20al.%20-%202021-%20Analisis%20kemampuan%20keuangan%20daerah%20dalam%20rangka%20pe.pdf).

<sup>3</sup> Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi* (Jakarta: Kencana 2020), 1.

<sup>4</sup> Enita Binawati dan Cyrenia Tri Nindyaningsih, "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas SKPD Di Kabupaten Klaten)", *Optimal*, Vol. 19, No.1, Maret 2022, 20.

<sup>5</sup> Pegi Aprisyah and Anik Yuliati, "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu)," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 5, no. 2 (2021): 1855–69.

<sup>6</sup> Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama 2019), 7. 142

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, agar supaya laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.<sup>8</sup> Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik diantaranya yaitu mengenai laporan keuangan yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri.<sup>9</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung dan menguji sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dan menguji sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan.

## **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang di dalam setiap subsistem tersebut peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Laporan keuangan merupakan salah satu media bagi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik.

---

<sup>7</sup> Novtania Mokoginta, dkk, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, No. 02, Tahun 2017, 874.

<sup>8</sup> Nuraini Ismail, dkk, "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pengendalian Internal, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo", *Open Journal Systems*, Vol. 15 No. 12 Juli 2021, 5889.

<sup>9</sup> Dito Aditia Darma Nasution, *Monograf Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia 2019), 1.

Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>10</sup> Sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai “sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011, sistem akuntansi keuangan daerah dapat diartikan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan proses pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun secara aplikasi computer.

Kuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut<sup>11</sup>.

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.<sup>12</sup>

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut pasal 232 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.<sup>13</sup> Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta 2005.

<sup>11</sup> Maryam dan Ikhbar Husna, “Yang Lebih Besar Dari Nilai T,” *Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kab Aceh Besar* 4, no. 2 (2022): 206–14.

<sup>12</sup> Tuti Herawati, Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School De?i Nopianti, and Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School Abstrak, “10-1-34-1-10-20200225,” *STAR – Study & Accounting Research / Vol XIV, No. 2 - 2017 XIV, no. 2* (2017).

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta 2006.

<sup>14</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 84.

## **Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal adalah seperangkat prosedur dan kebijakan untuk melindungi asset atau kekayaan organisasi atau lembaga dari penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi yang akurat dan memastikan seluruh pegawai telah mematuhi peraturan perundang-undangan serta kebijakan manajemen yang berlaku<sup>15</sup>.

Sistem pengendalian internal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting dan harus kita perhatikan, agar tercapai efisiensi, kemanfaatan dan pencegahan kerugian keuangan nasional, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Sistem Pengendalian Internal merupakan proses integral dari tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan jaminan yang memadai bagi pencapaian tujuan organisasi.<sup>16</sup> Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (10), mendefinisikan “sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian, efektifitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.<sup>17</sup>

Unsur sistem pengendalian internal dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Internal yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi:<sup>18</sup>

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi kriteria yang telah ditetapkan. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Arika Shofa, Khuznatul Zulfa Wafirotin, and Iin Wijayanti, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Madiun),” *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 6, no. 1 (2022): 128–44, <https://doi.org/10.24269/iso.v6i1.1136>.

<sup>16</sup> Sri Dewi Anggadini, dkk, “Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Dari Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”, *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 12, No. 2, Mei– Agustus 2021, 166.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jakarta 2008.

<sup>18</sup> Oka Reza Aditya, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Sikap*, Vol 2, No. 1, 2017, 52

<sup>19</sup> Dito Aditia Darma Nasution, *Ibid*, 2.

Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (relevance), andal (reability), dapat dipahami (understandability), dan dapat di bandingkan (comparability).<sup>20</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan (PP No. 71, 2010) dan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.<sup>21</sup>

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Kabupaten Pamekasan merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali berturut-turut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "kewajaran" penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan "jaminan" bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya.

Meski mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 terhadap delapan pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut di antaranya: terdapat pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap yang masih belum memadai, terdapat penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih belum memadai, terdapat kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memadai, terdapat Penatausahaan Persediaan atas bantuan COVID-19 Tahun Anggaran 2021 yang masih belum memadai, terdapat kemahalan harga Pengadaan Barang Penanganan COVID-19 dari Belanja Tak Terduga, terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal, terdapat pencatatan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar yang masih belum memadai, terdapat pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang masih kurang memadai.

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta 2010.

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta 2010.

Sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada delapan pemerintah daerah atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh ke delapan pemerintah daerah tersebut. Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel. Fenomena ini melanggar ruang lingkup kualitas laporan keuangan yang tidak relevan dalam arti tidak tepat waktu akibat masalah pengelolaan aset yang belum terselesaikan, tidak lengkap, dan tidak tuntas, karena masih terdapat masalah yang harus ditindaklanjuti.<sup>22</sup>

Penerapan sistem akuntansi keuangan yang akuntabel serta dengan pengendalian yang bersistem dan terorganisir akan mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan. Penerapan sistem akuntansi keuangan yang terarah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.<sup>23</sup>

Enita dan Cyrenia, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan sistem pengendalian internal juga berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nuraini, Apriana, dan Elsensiana, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adanya dukungan sistem pengendalian internal yang kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penilaian kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan berdasarkan kriteria sistem pengendalian internal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji kekuatan. Sistem pengendalian ini dalam setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan ruang lingkup pengujian yang akan dilaksakannya<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Pamekasan Hebat, *Laporan Keuangan Pemkab Pamekasan 2020 Raih Predikat WTP*, <https://pamekasanhebat.com/2021/05/25/laporan-keuangan-pemkab-pamekasan-2020-raih-predikat-wtp/> (Diakses Pada 2 April 2022).

<sup>23</sup> Ira Gustina, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2021, 57.

<sup>24</sup> DPR, "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.," 2004, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE>

## Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki beberapa kriteria, diantaranya: (a) kesesuaian dengan SAP, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap perundang-undangan, (efektivitas pengendalian internal. Kualitas laporan keuangan berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik, maka akan dapat mempertanggungjawabkan atas laporan keuangan yang dibuat. Laporan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dengan dari faktor kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsinya atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan<sup>25</sup>.

Untuk pengambilan sebuah keputusan, maka hasil laporan keuangan harus ditampilkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh para pengambil keputusan. Pengambil keputusan yang dimaksud adalah para pengguna laporan keuangan baik pihak internal atau pihak eksternal. Dan secara umum bahwa laporan keuangan mencerminkan dampak peristiwa periode sebelumnya dan tidak perlu mengandung informasi non keuangan dan laporan keuangan tidak memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan<sup>26</sup>.

Dalam mengambil keputusan kualitas laporan keuangan harus memberikan informasi pada laporan keuangan yang disajikan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya, laporan keuangan harus menyajikan fakta secara jujur serta relevan sehingga sehingga laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan<sup>27</sup>.

Kualitas atau mutu dapat dinilai dengan tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Sehingga karakteristik kualitatif harus dipenuhi dalam suatu laporan keuangan agar dapat dinilai sebagai laporan keuangan yang berkualitas. Adapun karakteristik kualitatif dari suatu laporan keuangan adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

wjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQfjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2Fdocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo.

<sup>25</sup> Emilianus Eo Kutu Goo and Paulus Libu Lamawitak, "Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5, no. 2 (2021): 98–110, <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440>.

<sup>26</sup> Reza Ilham Putra and Halmawati Halmawati, "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuang Daerah, Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4, no. 3 (2022): 589–97, <https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.479>.

<sup>27</sup> Nishrina Atharrizka, Yayuk Nurjanah, and Toni Andrianto, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Informatika Kesatuan* 1, no. 2 (2021): 107–16, <https://doi.org/10.37641/jikes.v1i2.889>.

<sup>28</sup> Siska Yulia Defitri, "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", *Jurnal Benefita* 3 (1) Februari 2018, 68.

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.

### **Lokasi Dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang berlokasi di jalan Kabupaten No.107, Sumur Putih, Bugih, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, 69317. Objek penelitian ini adalah bagian keuangan pada SKPD di Kabupaten Pamekasan.

### **Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Kepala SKPD dan kepala Bagian Keuangan SKPD. Sedangkan Sampelnya adalah menggunakan Non probability sampling (Purposive sampling) sebanyak dua orang pada tiap instansi sebanyak 35 SKPD yang ada di Instansi Kabupaten Pamekasan.

### **Sumber Dan Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung pada Badan, Dinas, dan Inspektorat yang ada di Kabupaten Pamekasan. Angket atau Kuesioner adalah metode pengumpulan data, instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis, tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya.

### **Pengujian Hipotesis**

Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kuliatas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, digunakan analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut:  $Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dan kemudian menyajikan dalam bentuk yang baik. Statistik deskriptif digunakan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Adapun karakter yang digunakan dalam penelitian ini adalah *minimum*, *maximum*, nilai rata-rata

(mean), dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	64	14	25	21,47	2,737
X2	64	27	45	37,58	4,147
Y	64	36	55	48,25	4,824
Valid N (listwise)	64				

Sumber : Data Diolah SPSS

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden (N) yang di nilai valid dan dapat diuji lebih lanjut berjumlah 64 responden. Dapat dilihat, pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) mempunyai nilai minimum 14,0 dan nilai maksimum 25,0 serta 21,47 sebagai nilai rata-rata (mean) jawaban responden dengan standar deviasi 2,737. Pada variabel sistem pengendalian internal (X2) mempunyai nilai minimum 27,0 dan nilai maksimum 45,0 sebagai nilai rata-rata (mean) jawaban responden 37,58 dengan standar deviasi 4,147. Sedangkan pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) mempunyai nilai minimum 36,0 dan nilai maksimum 55,0 serta 48,25 sebagai nilai rata-rata (mean) jawaban responden dengan standar deviasi 4,824.

## Pengujian Kualitas Data

### Uji Validitas

Uji validitas yang dapat dilihat dengan membandingkan antara  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ , dikatakan valid jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yang dapat dihitung dengan  $df = n - 2$ , dalam penelitian ini jumlah sampel  $n = 64$ . Maka besarnya  $df = 64 - 2 = 62$  dengan tingkat signifikasinya 0,05 dan nilai  $r_{tabel}$  0,250.

Berdasarkan hasil uji validitas setelah dilakukan pengujian dengan membandingkan  $r_{hitung}$  dan  $r_{tabel}$  dari masing-masing item pertanyaan maka dapat diketahui bahwa total skor dari setiap item pernyataan pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) menunjukkan nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari 0,250 dengan tingkat signifikasinya dibawah 0,05. Pada variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) menunjukkan nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari 0,250 dengan tingkat signifikasinya dibawah 0,05. Sedangkan pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) menunjukkan nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari 0,250 dengan tingkat signifikasinya dibawah 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan setiap variabel dalam kuesioner dinyatakan valid.

### Uji Realibilitas

Berdasarkan hasil uji realibilitas dapat diketahui bahwa data tersebut mempunyai sebanyak 64 responden dengan presentase 100% dengan jumlah data yang lengkap. Hasil uji realibilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) sebesar 0,925, ada hasil uji realibilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) sebesar 0,906, dan pada hasil uji realibilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,934 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner ini dinyatakan reliabel karena setiap variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

### Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov***

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.21015802
Most Extreme Differences	Absolute	.151
	Positive	.151
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		1.206
Asymp. Sig. (2-tailed)		.109
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

*Sumber : Data Diolah SPSS*

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat setelah bahwa nilai signifikansi yang diperoleh berdasarkan uji statistik *Kolmogoro-Smirnov* yaitu sebesar 0,109. Hal ini menunjukkan nilai yang diperoleh lebih dari nilai signifikannya yaitu > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian data terdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	(Constant)		
	X1	,454	2,205
	X2	,454	2,205

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah SPSS

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) sebesar 0,454 > 0,10 dengan nilai VIF sebesar 2,205 < 10 dan nilai *tolerance* variabel sistem pengendalian internal (X2) sebesar 0,454 > 0,10 dengan nilai VIF sebesar 2,205 < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,806 <sup>a</sup>	,650	,638	2,902	1,966
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah					
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					

Sumber : Data Diolah SPSS

Berdasarkan hasil pada tabel diatas dapat dilihat dari hasil pengujian tersebut nilai Durbin Watson yang diperoleh adalah 1,966. Dari jumlah dat (n)= 64 dan jumlah variabel independen k= 2, maka diperoleh nilai dL sebesar 1,531 dan nilai dU sebesar 1,660. Dengan penjelasan tersebut diperoleh hasil sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Durbin Watson bahwa  $dU < d < 4-dU$  yaitu  $1,660 < 1,966 < 2,340$ , maka dari itu hasil menunjukkan tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif dan dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian tidak ada terjadinya autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser**

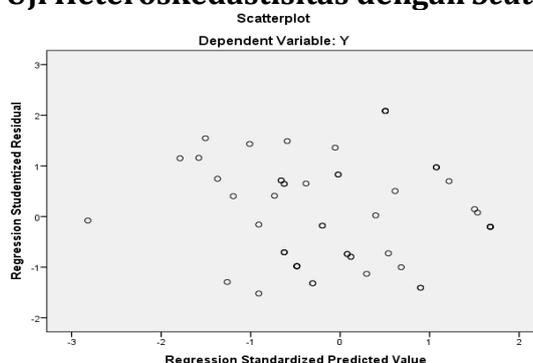
Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,121	1,331		3,096	,003
	X1	,011	,078	,027	,145	,885
	X2	-,066	,051	-,239	-1,290	,202

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Sumber : Data Diolah SPSS

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) sebesar 0,885 dan nilai variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,202. Sehingga sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai nilai sebesar  $0,885 > 0,05$  dan sistem pengendalian internaal  $0,202 > 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel keduanya tidak mengalami heteroskedastisitas hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi kedua variabel  $> 0,05$ .

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot**



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa data atau titik-titik tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi kualiasi laporan keuangan daerah berdasarkan variabel yang mempengaruhinya yaitu sistem akuntansi keuangan daerah (X1) dan sistem pengendalian internal (X2).

### Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan bantuan SPSS. Variabel bebas (*independent*) dalam penelitian ini yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2). Sedangkan variabel terikat (*dependent*) yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh koefisien regresi yang akan memutuskan apakah hipotesis yang ada dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,133	2,624		3,481	,001
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,755	,154	,428	4,914	,000
	Sistem Pengendalian Internal	,610	,101	,524	6,019	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Data Diolah SPSS

Berdasarkan perhitungan yang disajikan pada tabel diatas , maka hasil dari persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 9,133 + 0,755X_1 + 0,610X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan analisis regresi linier berganda diatas, maka hasil pembahasan regresi tersebut adalah:

- 1) Nilai konstanta yaitu sebesar 9,133, artinya jika variabel bebas (*independent*) yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal bernilai 0 atau tidak ada, maka nilai dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 9,133. Nilai konstanta sebesar 9,133 memberikan penjelasan bahwa kedua variabel bebas tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
- 2) Nilai koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah (X1) menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,755. Apabila sistem akuntansi

keuangan daerah meningkat sebesar 1% maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,755, dengan asumsi bahwa variabel bebas (*independent*) lainnya dianggap bernilai 0 atau konstan.

- 3) Nilai koefisien regresi sistem pengendalian internal (X2) menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,610. Apabila sistem akuntansi keuangan daerah meningkat sebesar 1% maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,610, dengan asumsi bahwa variabel bebas (*independent*) lainnya dianggap bernilai 0 atau konstan.

### Uji Parsial atau Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan nilai signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai  $t_{tabel}$  diperoleh dengan menentukan nilai df yaitu 61, selanjutnya diperoleh  $t_{tabel}$  dengan nilai 1,670. Berikut adalah tabel yang menyajikan secara jelas terkait hasil uji parsial atau uji t.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Parsial atau Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,133	2,624		3,481	,001
	X1	,755	,154	,428	4,914	,000
	X2	,610	,101	,524	6,019	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah SPSS

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) mempunyai nilai signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$  yang artinya sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Pada hasil pengujian variabel sistem pengendalian internal (X2) mempunyai nilai signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$  yang artinya sistem pengendalian internal daerah secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

### Uji F

Dalam penelitian ini uji F dilakukan untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai F hitung diperoleh jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $F < 0,05$ , maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan hipotesis  $H_1$  diterima begitu juga sebaliknya. Berikut adalah tabel yang menyajikan secara jelas terkait hasil uji F.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1158,258	2	579,129	114,794	,000 <sup>b</sup>
	Residual	307,742	61	5,045		
	Total	1466,000	63			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Sumber : Data Diolah SPSS

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah (X1) dan sistem pengendalian internal (X2) memiliki nilai  $F_{hitung}$  sebesar 114,794 pada tingkat signifikansi 0,000 dan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,15 pada tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu sebesar  $114,849 > 3,15$  dan nilai signifikan yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$ .

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model regresi untuk menerangkan variasi dari variabel terikat (*dependent*) dengan nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai  $R^2 = 0$  berarti variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen dan nilai  $R^2 = 1$  berarti variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut adalah tabel yang menyajikan secara jelas terkait hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>).

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,889 <sup>a</sup>	,790	,783	2,246
a. Predictors: (Constant), X2, X1				

Sumber : Data Diolah SPSS

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai R Square yaitu sebesar 0,790 atau 79,0%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat dipengaruhi variabel bebas yang artinya variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal sebesar 79,0%. Sedangkan sisanya sebesar 21,0% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kuliatas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.**

Dari hasil penelitian ini, bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan sinifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Pamekasan, hal ini di buktikan dengan nilai konstanta yaitu sebesar 9,133, artinya jika variabel bebas (*independent*) yaitu sistem akuntansi keuangan daerah bernilai 0 atau tidak ada, maka nilai dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 9,133. Nilai konstanta sebesar 9,133 memberikan penjelasan bahwa kedua variabel bebas tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini di dukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh A. Rahman yang menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,000, di bawah 0,05 artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kuliatas laporan keuangan daerah<sup>29</sup>.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kuliatas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.**

Dari hasil penelitian ini, bahwa sistem sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan sinifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Pamekasan, hal ini di buktikan dengan nilai konstanta yaitu sebesar 9,133, artinya jika variabel bebas (*independent*) yaitu sistem pengendalian internal bernilai 0 atau tidak ada, maka nilai dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 9,133. Nilai konstanta sebesar 9,133 memberikan penjelasan bahwa kedua variabel bebas tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini juga didukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Sarwono yang mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kementerian agama yang dapat dilihat dari uji hipotesisnya nilai t hitung sebesar 2,089 > 1,960 artinya bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kementerian agama<sup>30</sup>. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang

---

<sup>29</sup> Abdul Rahman and Ayudhini Azzahra Permatasari, "Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah," *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2021): 14–22, <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.11153>.

<sup>30</sup> Norma Riza Umami Sarwono and Munari Munari, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan

dilakukan oleh Anggreni, ia menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan terbukti dengan nilai signifikansinya 0,000 berada dibawah nilai 0.05<sup>31</sup>. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wardani, ia menyebutkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari t table sebesar  $6,394 > 1,979$ . Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Artinya sistem pengendalian internal dapat membantu dan mempengaruhi positif dalam kualitas laporan keuangan<sup>32</sup>.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ) menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Aditya Sanjaya, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar)", Jom Fekon, Vol. 4, No. 1, Februari 2017.

---

Keuangan Dengan Good Governance Sebagai Variabel Pemoderasi," *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 7, no. 2 (2022): 616, <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.500>.

<sup>31</sup> I Gusti Ayu Putri Anggreni and Luh Gede Kusuma Dewi, "Pengaruh Kompetensi SDM Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi," *Jurnal Akuntansi Profesi* 13, no. 2 (2022): 490–500.

<sup>32</sup> Qholba Ainun Wardani, Ardyan Firdausi Mustoffa, and Titin Eka Ardiana, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa," *MAKSIMUM Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 12, no. 2 (2022): 97–106, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>.

- Adni Dwi Astuti, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Via Website (Studi Empiris Keuangan Pada Pemerintah Daerah Di Jawa Timur Periode 2018)”, *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020.
- Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016).
- Ali Anwar, *Statistika Untuk Penelitian dan Aplikasinya Dengan SPSS dan Excel*, (Kediri: IAIT Press, 2009).
- Andi Ibrahim, *Metodologi Penelitian*, (Makassar: Gundarma Ilmu, 2018).
- Anggreni, I. G. A. P., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 490–500.
- Aprisyah, Pegi, and Anik Yuliaty. 2021. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu).” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 5 (2): 1855–69.
- Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis*. (Bandung: Citapustaka Media, 2014).
- Atharrizka, N., Nurjanah, Y., & Andrianto, T. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 1(2), 107–116. <https://doi.org/10.37641/jikes.v1i2.889>
- Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS*, (Jakarta: Guepedia, 2021), 17.
- Chandra Christalisana, “Pengaruh Pengalaman dan Karakter Sumber Daya Manusia Konsultan Manajemen Konstruksi Terhadap Kualitas Pekerjaan Pada Proyek Di Kabupaten Pandeglang”, *Jurnal Fondasi*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2018.
- DPR. (2004). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Ffid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Dito Aditia Darma Nasution, *Monograf Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia 2019).
- Enita Binawati dan Cyrenia Tri Nindyaningsih, “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas SKPD Di Kabupaten Klaten)”, *Optimal*, Vol. 19, No.1, Maret 2022.
- Erwin Siahaya, Dkk, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua”, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 03, No. 1, Mei 2018.

- Emilianus Eo Kutu Goo, & Paulus Libu Lamawitak. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 98–110. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440>
- Freddy Samuel Kawatu, Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik, (Yogyakarta: CV. Budi Utama 2019).
- Husna, maryam dan ikhbar. (2022). Yang Lebih Besar Dari Nilai T. *Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kab Aceh Besar*, 4(2), 206–214.
- Anggreni, I Gusti Ayu Putri, and Luh Gede Kusuma Dewi. “Pengaruh Kompetensi SDM Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi.” *Jurnal Akuntansi Profesi* 13, no. 2 (2022): 490–500.
- Aprisyah, Pegi, and Anik Yulianti. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu).” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 5, no. 2 (2021): 1855–69.
- Atharrizka, Nishrina, Yayuk Nurjanah, and Toni Andrianto. “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Informatika Kesatuan* 1, no. 2 (2021): 107–16. <https://doi.org/10.37641/jikes.v1i2.889>.
- DPR. “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.” 2004. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.
- Emilianus Eo Kutu Goo, and Paulus Libu Lamawitak. “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5, no. 2 (2021): 98–110. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440>.
- Husna, maryam dan ikhbar. “Yang Lebih Besar Dari Nilai T.” *Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kab Aceh Besar* 4, no. 2 (2022): 206–14.
- Irmadiani, Nadia Dwi. “2792-7524-1-Pb.” *Pulic Service and Governance Journal* 03, no. 01 (2022): 67–79. <file:///C:/Users/WADHAN/Downloads/SIA/2792-7524-1-PB.pdf>.
- Nalle, Frederic Winston, Kamilaus K Oki, and Putra M M Sangaji. “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Inovasi* 17, no. 1 (2021): 184–97. [https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf](https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle%20et%20al.%20-%202021%20-%20Analisis%20kemampuan%20keuangan%20daerah%20dalam%20rangka%20pe.pdf).

- Putra, Reza Ilham, and Halmawati Halmawati. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4, no. 3 (2022): 589–97. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.479>.
- Rahman, Abdul, and Ayudhini Azzahra Permatasari. "Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah." *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2021): 14–22. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.11153>.
- Sarwono, Norma Riza Umami, and Munari Munari. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Good Governance Sebagai Variabel Pemoderasi." *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 7, no. 2 (2022): 616. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.500>.
- Shofa, Arika, Khuznatul Zulfa Wafirotin, and Iin Wijayanti. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Madiun)." *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 6, no. 1 (2022): 128–44. <https://doi.org/10.24269/iso.v6i1.1136>.
- Tuti Herawati, Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School De?i Nopianti, and Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School Abstrak. "10-1-34-1-10-20200225." *STAR – Study & Accounting Research | Vol XIV, No. 2 - 2017* XIV, no. 2 (2017).
- Wardani, Qholba Ainun, Ardyan Firdausi Mustoffa, and Titin Eka Ardiana. "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa." *MAKSIMUM Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 12, no. 2 (2022): 97–106. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>.
- eru Kreshna Reza, Akuntansi Pemerintah Edisi 1, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia 2022).
- Ira Gustina, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal A.kuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2021
- Irmadiani, Nadia Dwi. 2022. "2792-7524-1-Pb." *Pulic Service and Governance Journal* 03 (01): 67–79. <file:///C:/Users/WADHAN/Downloads/SIA/2792-7524-1-PB.pdf>.
- Ismail & Bambang Triyanto, Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Suatu Pedoman (Klaten: Lakeisha, 2019).
- Kurniawan Dalam Sudaryono, Metodologi Penelitian. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Kristiawan Nugroho, Model Analisis Prediksi Menggunakan Metode Fuzzy Time Series, (Jurnal: Amik JTC Semarang, 2016).
- "Laporan Keuangan Pemkab Pamekasan 2020 Raih Predikat WTP- Pamekasan Hebat" Diakses 02 April 2022. <https://pamekasanhebat.com/2021/05/25 /laporan-keuangan-pemkab-pamekasan-2020-raih-predikat-wtp/>.

- Maria Magdalena M, “Strategi Perusahaan Dalam Penanganan Berkurangnya Fokus Pegawai Di Kecamatan Gunung Pati”, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, Vol. 10, No. 2 (2019).
- Maindro, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013).
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).
- Monika Handayani, *Akuntansi Sektor Publik*, (Banjarasin: Poliban Press, 2019).
- Nalle, Frederic Winston, Kamilaus K Oki, and Putra M M Sangaji. 2021. “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Inovasi* 17 (1): 184–97. [https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf](https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle%20et%20al.%20-%20Analisis%20kemampuan%20keuangan%20daerah%20dalam%20rangka%20pe.pdf).
- Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Pada Entitas Akuntansi* (Jakarta; Kencana 2020).
- Nuraini Ismail, dkk, “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pengendalian Internal, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo”, *Open Journal Systems*, Vol. 15 No. 12 Juli 2021.
- Novtania Mokoginta, dkk, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, No. 02, Tahun 2017.
- Oka Reza Aditya, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Sikap*, Vol 2, No. 1, 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jakarta 2008.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Jakarta 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta 2010.
- Putra, R. I., & Halmawati, H. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuang Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(3), 589–597. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.479>
- Rahman, A., & Permatasari, A. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.11153>
- Rapika Anwar, *Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2021).
- Ratni Purwasih, *Ekonometrika Dasar Teori Dan Praktik Berbasi SPSS*, (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021).

- Rifat Shafwatul A, "Instrumen Penelitian Yang Valid Dan Variabel", Jurnal Edukasi Sebelas April, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Rifka Dwi Apriliani, dkk, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", Jurnal Akuntansi, Auditing, dan Perpajakan, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Sarwono, N. R. U., & Munari, M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Good Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(2), 616. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.500>
- Saiful Khozi, Statistika Deskriptif Untuk Ekonomi, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012).
- Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020).
- Siska Yulia Defitri, "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", Jurnal Benefita 3 (1) Februari 2018.
- Sri Dewi Anggadini, dkk, "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Dari Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah", Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 12, No. 2, Mei– Agustus 2021.
- "Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan – Pamekasankab" – Diakses 09 Januari 2023. <https://pamekasankab.go.id/struktur/organisasi>.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Shofa, A., Wafirotn, K. Z., & Wijayanti, I. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Madiun). *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 128–144. <https://doi.org/10.24269/iso.v6i1.1136>
- Syofian Siregar, Metode penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Turkiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar), (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Tuti Herawati, Nopianti, D. S. S. – B. B. S. D., & Abstrak, P. J. S. S. – B. B. S. (2017). 10-1-34-1-10-20200225. *STAR – Study & Accounting Research | Vol XIV, No. 2 - 2017, XIV(2)*.
- "Visi – Misi Kabupaten Pamekasan – PPID Pamekasan" Diakses 09 Januari 2023. <https://ppid.pamekasankab.go.id/visi-misi/>.
- Wardani, Q. A., Firdausi Mustoffa, A., & Ardiana, T. E. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *MAKSIMUM Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 12(2), 97–106. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Whella Puput Wiranti, "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan, Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD", Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 5, Mei 2021.

*Istifara Suci Pangestuning Ajeng, Wadhan*

Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, *Statistika Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).